

Kebutuhan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah

Poverty Prevention Need in the North Coast of Central Java Province

Arif Sofianto

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jl. Pemuda 127-133 Semarang, Telpn (024) 3515591. HP. +628522270011

Email: areef_sofiant@yahoo.com. Diterima 15 April 2017, diperbaiki 19 Juni 2017, disetujui 23 Agustus 2017

Abstract

The coastal communities is one of the main groups of the poorest. The policies that have been implemented in coastal areas often result in some circumstances as ecological destruction, poverty gap and traditional fishing, as well as public dependence on financiers. This research aims to understand the need to reduce poverty in coastal areas according to the characteristics and needs of the community. This type of research is qualitative-descriptive. The location of research in Juwana sub district, Pati Regency, and the Ulujami Subdistrict in Pemalang Regency. Respondents are 100 people, consisting of representatives from local government, community organizations, cooperatives, fishermen, farmers, fishpond farmers, and fish processors. The technique of collecting data using interviews, focus group discussions and observation. Data were analyzed using a model developed by Spradley, which is the unity of a linear process that starts from domain analysis, taxonomic, componential and of cultural themes. The conclusion of this study is that a model of addressing poverty in the north coast of Central Java community is a concept that promotes empowerment principle, commitment to the beliefs, values, customs, common interests, including create transparency, honesty, solidarity and community involvement.

Keywords: *poverty; coastal communities; Central Java*

Abstrak

Masyarakat pesisir dianggap sebagai satu kelompok termiskin di Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap kawasan pesisir sering mengakibatkan beberapa kondisi berupa perusakan ekologi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan nelayan tradisional, dan ketergantungan masyarakat terhadap pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dan Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pemalang. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, koperasi, nelayan, petambak, pengolah hasil perikanan dan petani. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Spradley, yang merupakan kesatuan proses linear dimulai dari analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema budaya. Kesimpulan penelitian ini model penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir utara Jawa Tengah berupa konsep pemberdayaan yang mengutamakan prinsip, komitmen pada keyakinan, nilai, adat kebiasaan, kepentingan bersama, serta menciptakan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat.

Kata kunci: kemiskinan; masyarakat pesisir utara; provinsi jawa tengah.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang selalu menarik untuk dibicarakan dari berbagai sudut pandang teori, kewilayahan, dan memiliki beberapa alternatif pendekatan penanggulangan. Kemiskinan memiliki dimensi yang luas, baik struktural maupun kultural, in-

dividu maupun sosial, relatif maupun absolut, kewilayahan, sosial dan politik. Setiap individu dan kelompok memiliki ciri khas kemiskinan tersendiri, misalnya dipengaruhi oleh keterpencilan, gaya hidup, struktur ekonomi, atau keterbatasan sumberdaya.

Masyarakat pesisir, terutama nelayan lekat dengan kemiskinan, bahkan disebut kelompok miskin di antara yang miskin (Sipahelut, 2010). Kusumaningrum (2013) dalam studinya tentang kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo, menyebutkan bahwa kemiskinan nelayan terkait dengan masalah kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural.

Menurut Kusnadi (dalam Sipahelut, 2010) penyebab kemiskinan masyarakat nelayan dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Sebab internal mencakup keterbatasan kualitas SDM, modal dan teknologi, hubungan kerja kurang menguntungkan, kesulitan diversifikasi usaha, ketergantungan terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup boros. Sebab eksternal meliputi kebijakan yang berorientasi produktivitas dan parsial, sistem pemasaran yang merugikan, kerusakan ekosistem, peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah, terbatasnya teknologi pengolahan, terbatasnya peluang-peluang kerja non perikanan, kondisi alam dan musim, dan isolasi geografis.

Ketimpangan akses dan sumberdaya juga merupakan salah satu permasalahan penyebab kemiskinan. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut baru dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu seperti juragan kapal dan pengusaha perikanan, tetapi belum oleh masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan kecil atau buruh nelayan. Selain kesenjangan dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikan justru menjadi permasalahan yang lebih serius (Syarief, 2001). Akumulasi sumberdaya pada pihak-pihak tertentu mengarah pada penurunan aksesibilitas oleh masyarakat. Misalnya saja dalam hal penangkapan, hanya yang memiliki kapal lebih besar dan teknologi yang lebih maju yang dapat menguasai sumberdaya laut. Menurut hasil penelitian Widodo (2011) tentang faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir di Kwanyar Barat, Kabupaten Bangkalan adalah rendahnya akses terhadap modal terutama finansial sehingga menyebabkan nelayan tidak mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern.

Masyarakat pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya, berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, dalam Kusnadi, 2010). Menurut Yudi Wahyudin (2003), karaktersistik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi berupa tergantung pada lingkungan, musim, dan pasar. Masyarakat nelayan pesisir juga dikenal dengan perilaku mengeksploitasi terus-menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem.

Di sisi lain terdapat juga yang mengeksploitasi dengan tindakan konservasi, seperti pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2010). Perilaku merusak dianut oleh sebagian besar nelayan untuk sumberdaya yang sifatnya terbuka, dan perilaku konservasi ditunjukkan oleh komunitas adat atau lokal yang mengelola sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif (Kusnadi, 2010).

Kerentanan perubahan secara ekologis juga berpengaruh secara signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Salah satu contoh pertambahan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir menyebabkan tekanan terhadap ekosistem *mangrove* yang ada (Auliyani, et al, 2014). Ada tarik menarik antara yang mengeksploitasi alam dan yang memerlukan kelangsungan nafkah dari alam.

Temuan lainnya dari hasil penelitian Manumono (2008) bahwa abrasi tambak dan rob menyebabkan penurunan pendapatan petani tambak dan nelayan sehingga mereka mengalami perubahan perilaku yang bersifat negatif yaitu apriori, apatis dan mengalami gangguan jiwa. Sebagian petani dan nelayan yang hilang tambaknya beralih menjadi buruh serabutan, nelayan *seser* ataupun nelayan tangkap (sampan dan jaring), yang sebelumnya juragan berubah menjadi petani penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian Primyastanto, dkk (2010) bahwa faktor timbulnya perusakan lingkungan wilayah pesisir tersebut karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan penduduk tentang pentingnya menjaga lingkungan. Masalah yang terjadi di pesisir tersebut salah satunya adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pengguna sumberdaya pesisir dan lautan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memainkan peran kunci dalam pengorganisasian sosial dengan bertindak sebagai fasilitator, katalisator, pelopor kepemimpinan dan pemasok kepemimpinan peralihan (Pieter, 2001).

Hiariey (2013) menemukan, bahwa strategi meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah dengan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*co-management*). Melalui pengelolaan semacam ini diharapkan masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan. Ticoalu et. al (2013) menyampaikan, bahwa keberhasilan program karena masyarakat, pemerintah dan pengusaha memiliki kontribusi yang relatif sama terhadap moral, ditinjau dari pemberdayaan masyarakat pesisir.

Faktor lain yang berpengaruh adalah kebijakan pemerintah. Sesuai hasil penelitian Efrizal Syarief (2001), bahwa kebijakan pembangunan kelautan cenderung mengarah kepada “produktivitas” memaksimalkan *eksploitasi* tanpa ada pengendalian. Kebijakan tersebut mengakibatkan beberapa kondisi berupa *overfishing*, *perusakan* ekologi laut dan pantai, kesenjangan dan kemiskinan nelayan tradisional, ketergantungan masyarakat nelayan kecil atau tradisional terhadap pemodal besar atau modern, antara nelayan dan pedagang, antara *pherphery* terdapat *center*, antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Tulungen (2001), pendekatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dapat menjadi rujukan adalah berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini telah menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Indo-

nesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang desentralistis.

Menurut hasil penelitian Fitriansah (2012), keberhasilan pemberdayaan di pesisir berhasil dengan adanya kesadaran kepada masyarakat, bahwa program yang mereka jalankan bukan semata-mata program dari pemerintah, melainkan juga menjadi program mereka sendiri. Terdapat tiga aktor yang memainkan perannya dengan sempurna, yakni pemerintah daerah sebagai pembina dan pengarah program, masyarakat lokal sebagai pelaksana utama seluruh kegiatan dan kelompok yang memfasilitasi hubungan kedua aktor secara transparan dan terbuka. Selanjutnya hasil penelitian Mardjoeki (2012) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir perlu adanya kerja sama yang simultan dan lintas sektoral, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan cara pendekatan partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah. Demikian juga dengan hasil penelitian Arviyanthi, et al, (2014), bahwa faktor pendukung pemberdayaan adanya komitmen, lingkungan politik yang stabil, peraturan daerah yang tidak memberatkan, masyarakat yang ingin berubah, ada kelompok yang peduli lingkungan, keterpaduan dengan visi dan misi dinas. Faktor kunci keberhasilan adanya koordinasi dan kerjasama.

Hasil penelitian Indarti, et al, (2013) juga menyatakan, bahwa penguatan kelembagaan koperasi nelayan sebaiknya diawali dengan mengorganisir nelayan yang mempunyai kepentingan ekonomi dan komitmen yang sama untuk bergabung dalam organisasi koperasi. Oleh sebab itu, penanggulangan permasalahan kemiskinan di pesisir tidak mengabaikan aspek pemberdayaan. Di dalam pemberdayaan tersebut, perlu memperhatikan aspek sosial budaya dan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Kusnadi (2010) masyarakat nelayan (pesisir) memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan mata pencaharian penduduknya, yaitu etos

kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan. Apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian. Terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung “kasar”. Solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah. Kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi. Bergaya hidup “konsumtif “. Demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, bangunan rumah) sebagai manifestasi keberhasilan hidup. Agamis, dengan sentimen keagamaan yang tinggi, dan temperamental, khususnya jika terkait dengan harga diri.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang disebut Pantura (Pantai Utara) yang memiliki permasalahan kemiskinan dan karakter masyarakat seperti dikemukakan di atas. Sejarawan umumnya mengkategorikan pesisir pulau Jawa dibagi ke dalam dua kategori utama yaitu Pesisiran Barat meliputi Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wirodesa, Tegal, dan Brebes, serta Pesisiran Timur meliputi Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara (Itha, budaya masyarakat pesisir, <http://ithakelautan.blogspot.co.id>, 22 Mei 2013).

Masyarakat di Kabupaten Pati merupakan stereotip Pantura Jawa Tengah bagian timur dan Kabupaten Pemalang dapat mewakili karakter masyarakat Pantura Jawa Tengah bagian barat yang dapat dianggap sebagai contoh tersebut di atas. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan dalam rangka menganalisis berbagai karakter kemiskinan masyarakat pesisir dalam rangka memahami kebutuhan penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan dalam di wilayah pesisir utara Jawa Tengah.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pema-

lang dan Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pemalang difokuskan di Kecamatan Ulujami meliputi Desa Mojo, Pesantren, dan Limbangan. Di Kabupaten Pati difokuskan di Kecamatan Juwana, Desa Bakaran Kulon dan Desa Bajomulyo.

Responden penelitian ini berjumlah 100 orang tersebar di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pati. Di setiap Kecamatan diambil 2-3 desa. Responden terdiri atas masyarakat dari berbagai kelompok profesi dan sosial ekonomi. Di tiap desa yang menjadi unit penelitian, terdiri dari nelayan tangkap tiga orang, pembudidaya tambak tiga orang, pengolah hasil perikanan laut dua orang, UMKM berbasis perikanan dua orang, Perwakilan HNSI dua orang, Pengurus KUD satu orang, Pengelola TPI satu orang, Camat, Kepala Desa, Aparat Bappeda satu orang, Aparat Dinas Kelautan satu orang, Aparat Bapermades satu orang, Aparat Dinas Pariwisata satu orang, Tokoh Budaya satu orang, Perwakilan LSM (pemberdayaan nelayan, lingkungan pantai, UMKM) satu orang

Data primer dari hasil wawancara lapangan, sedang data sekunder berupa peraturan, buku yang berkaitan dengan masyarakat pesisir dari dinas instansi terkait serta hasil penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang sudah ada tentang masalah dan lokasi penelitian.

Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan: Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan responden, sedangkan daftar pertanyaan yang digunakan secara terbuka. *Focussed Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk memperdalam penggalian data dari masyarakat. Observasi, untuk mengamati hasil program pemberdayaan yang sudah dilakukan, kelembagaan masyarakat serta relasi sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Spradley seperti yang dikutip Iskandar (2008) dan Sugiyono (2009), yang terdiri dari Analisis Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Budaya.

C. Penanggulangan Kemiskinan di Pesisir Utara Jawa Tengah

1. Deskripsi Umum

Masyarakat pesisir dikenal lebih keras dalam berusaha, fokus pada pekerjaan yang cepat menghasilkan pendapatan, tetapi juga lebih mudah membelanjakan pendapatan yang mereka terima. Dalam pemilihan pekerjaan, mayoritas masyarakat pesisir lebih memilih pekerjaan yang cepat menghasilkan uang. Sebagian besar responden menyatakan, bahwa dalam memilih jenis pekerjaan pertimbangannya adalah cepat menghasilkan uang.

Nelayan di Kabupaten Pati untuk bisa cepat menghasilkan uang langsung menjual hasil tangkapan kepada bakul, tidak diolah menjadi hasil olahan yang langsung bisa dikonsumsi. Di Kabupaten Pemalang untuk cepat menghasilkan uang dengan berusaha berdagang masakan atau lauk-pauk, memancing kepiting, *ngarad* (menjaring), berjualan ikan segar dan sejenisnya. Sebagian mereka berusaha karena ingin cepat menjadi kaya

Pekerjaan sampingan merupakan salah satu upaya masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pada saat paceklik, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, sebagian memilih mencari pekerjaan tambahan, sebagian lainnya berhutang, sebagian lagi berhemat dan ada sebagian yang pasrah dengan kondisi tersebut. Alternatif paling banyak saat paceklik adalah mencari pekerjaan lain, sementara sebagian lagi berhutang dengan harapan ketika musim panen akan dapat terbayar. Nelayan mengaku memilih pekerjaan sebagai nelayan karena merasa cepat menghasilkan.

Tidak semua masyarakat pesisir mengusahakan pekerjaan sampingan, sebagian mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan karena berbagai keterbatasan dan alasan personal. Sepuluh lebih responden menyatakan masyarakat pesisir memiliki pekerjaan lain selain di sektor utama (tambak, pengolahan, UMKM). Pekerjaan sampingan menjadi penting ketika musim paceklik. Sebagian lainnya tidak memiliki pekerjaan sampingan karena merasa pekerjaan utama sudah

mampu mencukupi kebutuhan, atau karena tidak adanya kesempatan dan kemampuan menciptakan pekerjaan lain.

Dalam sektor pengolahan perikanan, jenis ikan atau olahan yang paling banyak dibudidayakan dan diolah adalah ikan bandeng karena modal tidak terlalu besar, mudah diperoleh, dan pasar luas. Meskipun paling banyak diolah di wilayah penelitian, tetapi jumlah bandeng yang diolah hanya sebagian kecil dibanding jumlah panen mereka, sebagian besar justru diolah di luar kota.

Di pesisir Kabupaten Pemalang, selain nelayan dan tambak, sebagian masyarakat juga bertani hortikultura baik sayur maupun buah-buahan serta bunga melati. Kendala yang dialami menurut Wasjud (petani di Ulujami) adalah harga jual produk jauh dari biaya produksi, harga tomat misalnya hanya 200 rupiah per kilogram. Petani membentuk kelompok, tetapi perlu bimbingan pasar, menyelaraskan dengan pasar industri. Petani juga kalah teknologi dengan daerah lain (Jawa Timur) sehingga perlu studi banding dan pelatihan.

Pada tingkat penghasilan, masyarakat pesisir cenderung dipengaruhi oleh musim. Pada saat tidak musim, pendapatan mengalami penurunan yang cukup besar, hampir separuhnya (42 persen). Hal ini menunjukkan ketergantungan besar terhadap musim.

Terkait dengan gaya hidup, masyarakat pesisir dinilai cenderung boros atau konsumtif. Mereka dianggap sering mempertontonkan keberhasilan ekonomi. Mereka juga lebih mudah membelanjakan uang mereka, terutama saat musim panen. Menurut responden di Kabupaten Pemalang, masyarakat pesisir karena merasa mudah menghasilkan uang, dalam gaya hidup berbusana, pola makan, tidak memikirkankan alokasi untuk menabung. Dari uang yang dihasilkan sebagian besar dibelanjakan. Namun sebagian lagi tidak demikian, pengeluaran agak banyak jika ada pendapatan lebih saja.

Baik di Kabupaten Pati maupun Kabupaten Pemalang, kecenderungan masyarakat pesisir terhadap kegiatan hiburan sangat tinggi. Se-

bagaimana diungkapkan oleh Pri (nelayan Bajulmulyo, Juwana), bahwa setiap tahun warga desa menyelenggarakan acara sedekah laut yang diiringi dengan hiburan yang menghabiskan dana sampai 450 juta rupiah.

Beberapa kendala dan halangan adalah minimnya infrastruktur serta kerusakan lingkungan mewarnai kondisi masyarakat pesisir. Minimnya akses jalan dan jembatan, telekomunikasi, dan energi kerap mewarnai kondisi mereka. Sebagai contoh, jalan menuju tambak bandeng di Bakaran Kulon, Juwana masih berupa makam sehingga akses kurang lancar dan mengganggu rantai penjualan ikan. Isu lingkungan lainnya berupa abrasi di tepi pantai serta pengendapan lumpur di saluran tambak, keamanan lingkungan serta produk olahan pangan hasil produksi masyarakat pesisir.

Dengan kehidupan yang keras, masyarakat pesisir memiliki semangat kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat pesisir relatif memiliki semangat kerja yang tinggi. Di Kabupaten Pati, semangat kerja tinggi terlihat dari banyak yang meninggalkan keluarga untuk mencari ikan di laut, bekerja keras walaupun cuaca ekstrem mereka tetap mencari ikan. Petambak penyewa bisa merangkap pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di Kabupaten Pemalang, ada masyarakat yang memiliki semangat tinggi, belajar, kerja keras, kreatif membuat peralatan, pengolahan dan budidaya. Namun masih ada masyarakat juga yang mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sikap mental lainnya adalah kompetitif, mencapai keberhasilan atas kemampuan sendiri. Masyarakat pesisir memiliki etos kerja yang mandiri dan berani mengambil tantangan. Namun ada sebagian yang tidak kompetitif dan lebih memilih kompromi. Di Kabupaten Pati, orang berani berupaya untuk maju, tidak takut gagal, jika berhasil akan menikmati, tetapi apabila tidak berhasil sudah merasa biasa hidup susah. Mereka sering tukar pengalaman, bekerja keras, berani berusaha keras. Sebagian merasa

hidup nyaman apa adanya, berusaha semampunya untuk menghidupi keluarga.

Di Kabupaten Pemalang masyarakat kebanyakan memiliki pekerjaan lebih dari satu macam, yang penting bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga merantau ke luar kota untuk mencari penghasilan tambahan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat pesisir lebih berani mengambil resiko dalam berusaha. Mereka berani mengambil resiko seperti berhutang, berganti komoditas untuk keberhasilan usaha.

Di Kabupaten Pati banyak yang mengambil hutang bank untuk menambah permodalan sampai miliaran rupiah, mereka berani spekulasi dalam usaha. Rata-rata memiliki usaha dengan modal besar seperti kapal dan tambak. Mereka juga berani mencoba suatu hal yang baru yang lebih mendatangkan untung. Di Kabupaten Pemalang berani ambil resiko contoh budidaya udang vaname dengan modal pinjaman dari bank atau koperasi, tidak memperdulikan berhasil tidaknya usaha. Selama masih ada pihak yang memberikan hutang, tetap berani berhutang untuk usaha. Nelayan biar pun cuaca kurang mendukung tetap berani melaut.

Dalam berusaha, persaingan antarmasyarakat cenderung lebih rendah, hanya terjadi dalam kasus-kasus tertentu, selebihnya bekerjasama. Menurut penuturan responden baik di Kabupaten Pemalang maupun Kabupaten Pati, persaingan tidak terlalu tinggi. Di Kabupaten Pati persaingan terjadi pada warga yang berlomba-lomba dalam meningkatkan hasil produksi. Ada yang bersaing dalam harga sewa lahan tambak. Akan tetapi mereka menyatakan melakukan persaingan dengan sehat. Sebagian menyatakan bahwa tidak terjadi persaingan karena kesenjangan ekonomi tidak menyolok, bahkan nelayan dalam mencari ikan saling berkomunikasi menggunakan radio frekuensi tinggi atau telepon seluler. Di tambak mereka bahkan bersama untuk mencari kebutuhan air. Pada umumnya banyak yang bekerja secara kelompok sehingga lebih membutuhkan kerjasama daripada persaingan.

Di Kabupaten Pemalang hampir sama, ada persaingan dalam meningkatkan kesejahteraan, mereka menunjukkan kekayaan dan keberhasilan, melakukan pembelian barang-barang. Masyarakat juga cenderung bersaing dalam meningkatkan produksi pertanian, baik petani sawah maupun tambak. Namun mereka menyatakan bersaing secara sehat. Di sisi lain ketika menghadapi kesulitan ada upaya kerjasama.

Masyarakat pesisir cenderung saling bersaing menunjukkan keberhasilan. Ketika panen mereka membelanjakan untuk berbagai barang dan kendaraan, sehingga rasa saling menunjukkan keberhasilan (dengan kepemilikan) beriringan dengan rasa saling membantu saat kesulitan. Meskipun demikian, solidaritas masih tetap tinggi, ada bantuan berupa pinjaman dari tetangga, tetapi hanya untuk mereka yang dipercaya. Hanya 36 persen yang menyatakan mendapatkan bantuan dari tetangga saat paceklik.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait dengan karakter sosial budaya. Pemahaman tersebut dapat mengarahkan upaya penanggulangan kemiskinan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan pola hidup kelompok sasaran.

Sesuai dengan penjelasan di atas, ada beberapa karakteristik yang bisa menjadi potensi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan. Ciri umum masyarakat pesisir adalah komitmen pada nilai adat dan tradisi yang mereka yakini cukup kuat. Mereka rela berkorban demi terjaganya nilai dan adat tersebut. Acara sedekah laut, ruwatan, sedekah bumi misalnya, selalu dilaksanakan setiap tahun. Sumberdaya dana, tenaga waktu yang dibutuhkan cukup besar, tetapi masyarakat sukarela mendukungnya. Acara sedekah laut yang kemudian diiringi dengan hiburan dananya mencapai ratusan juta rupiah, tetapi dengan mudah bisa didapatkan melalui iuran warga. Dana didapat dari iuran tiap musim panen baik dalam bentuk ikan maupun uang. Dari peristiwa terse-

but tampak bahwa adanya swadaya, kepedulian, sukarela tercipta dari komitmen terhadap nilai dan adat.

Karakter lainnya adalah keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat. Dari beberapa contoh keberhasilan pengelolaan program dana perguliran, sifat-sifat tersebut menjadi pendorongnya. Sebuah program haruslah memuat kejelasan sasaran, prioritas dan pengelolaan. Dengan adanya kredibilitas tersebut maka program akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Secara spesifik lokasi, berdasarkan tanggapan responden dan hasil pengumpulan data di lapangan, ada beberapa karakter yang menonjol pada masyarakat pesisir. Karakter tersebut meliputi ciri-ciri umum, perilaku ekonomi, serta perumusan strategi pemberdayaan yang tepat.

Di Kabupaten Pati, ciri umum masyarakat pesisir dikaitkan dengan sifat dan perilaku sehari-hari, keyakinan serta kondisi sosial ekonomi. Masyarakat pesisir dipandang memiliki sifat jujur, amanah, lugas, memegang teguh prinsip dan komitmen, terbuka, suka bergotong royong, berjiwa sosial, serta ekspresif. Masyarakat pesisir juga dikenal lebih agamis. Di sisi lain masyarakat pesisir juga dikenal mudah emosi, temperamental, berkarakter keras dan berbicara tegas. Masyarakat pesisir juga cenderung berpendidikan rendah atau kurang memperhatikan pendidikan.

Masyarakat pesisir di wilayah penelitian memiliki semangat kerja tinggi, pekerja keras, ulet, kompetitif, berani ambil resiko, tidak mudah putus asa. Sikap tersebut didukung oleh kejujuran, semangat kerjasama, gotong-royong, serta kemauan berkelompok. Karakter tersebut di atas, merupakan salahsatu penopang keberhasilan mereka dalam bidang perekonomian. Semangat wirausaha juga tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Di dalam melakukan usaha mereka juga mau berubah memanfaatkan teknologi atau cara baru dalam meningkatkan bidang usahanya. Di dalam menejemen usaha, berani mengambil resiko dalam permodalan,

pinjaman perbankan, pinjaman koperasi dan dana perguliran sangat dinamis.

Masyarakat pesisir berani berspekulasi dalam berusaha. Kebanyakan masyarakat pesisir sangat tergantung pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Prinsip masyarakat pesisir adalah selama masih ada pihak yang bersedia meminjamkan dana, mereka tetap berusaha meski dengan hutang yang banyak. Namun sebagian masyarakat pesisir juga mengalami masalah dengan manajemen keuangan, baik usaha maupun rumah tangga.

Selain beberapa karakter yang mendukung perekonomian, beberapa karakter teridentifikasi dapat menghambat perekonomian seperti boros, sulit berubah, dan kurang mempedulikan masa depan. Masyarakat sebagian masih kurang kompetensi usaha serta kapasitas pendidikan yang kurang. Masyarakat pesisir juga dianggap kurang menerima perubahan yang tidak sesuai dengan keinginannya, sulit menerima sesuatu yang dianggap kurang menguntungkan secara langsung. Untuk menerima hal baru biasanya masyarakat pesisir perlu contoh nyata keberhasilan. Masyarakat kebanyakan belum menerapkan cara atau teknik usaha yang baik jika belum menyaksikan keberhasilan. Masyarakat pesisir lebih menyukai hasil yang terlihat secara langsung, tidak memerlukan proses panjang. Masyarakat pesisir juga dikenal keras dan tegas, tetapi kadang menjurus temperamental serta sensitif sehingga potensi konflik tinggi.

Sikap mental lainnya yang kurang mendukung usaha adalah sebagian masyarakat tidak ramah lingkungan. Mereka memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarian. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar usaha mereka bisa terus berjalan juga masih kurang. Di Kabupaten Pematang, ciri utama masyarakat pesisir juga terkait dengan sifat dan perilaku sehari-hari, keyakinan dan kondisi sosial masyarakatnya, yang dipandang memiliki solidaritas tinggi. Mereka dianggap lebih ramah, masyarakat pesisir dianggap mudah beradaptasi dengan pendatang. Sama dengan kebanyakan masyarakat pesisir lainnya, masyarakat pesisir

Kabupaten Pematang cenderung berperilaku keras, cenderung berbahasa kasar dan arogan, serta emosional, tetapi relatif lebih agamis.

Dari beberapa penjelasan di atas, karakter yang mendukung perekonomian pada masyarakat pesisir adalah cenderung suka bekerja keras, memiliki semangat tinggi. Mereka memandang baik persaingan sebagai salahsatu langkah memajukan usaha. Masyarakat pesisir juga memiliki etos untuk menjadi pengusaha atau membuka lapangan kerja. Karakter yang dapat menghambat perekonomian antara lain etos kerja menurun jika menghadapi kesulitan, seperti ketika musim badai. Perilaku keseharian masyarakat pesisir cenderung konsumtif, jika mendapatkan uang lebih langsung dibelanjakan dengan segera.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan pada masyarakat pesisir tidak terlepas dari nilai budaya dan perilaku mereka. Berdasarkan kondisi masyarakat pesisir, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui pemberdayaan nilai karakter dan pola hidup untuk meningkatkan produktivitas.

Beberapa upaya pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan di pesisir berupa peningkatan kapasitas SDM, pemberian insentif serta akses. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah minat berwirausaha dan cepat menghasilkan didukung dengan upaya peningkatan kapasitas SDM dengan cara memberikan pemahaman dan keterampilan manajemen wirausaha sehingga bisa berwirausaha secara baik.

Mengubah *mindset* dari jiwa pekerja menjadi pengusaha, meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dengan membudidayakan potensi yang ada. Mengubah *mindset* masyarakat pesisir dari eksploitasi sumberdaya alam menjadi pelestarian untuk keberlangsungan nafkah mereka. Memberikan wacana diversifikasi nafkah dan usaha baru yang berkelanjutan. Secara rutin dilakukan pembinaan dan peningkatan keterampilan dalam bidang-bidang usaha alternatif.

Akses terhadap jaminan sosial dan pelayanan dasar untuk mengurangi beban pengeluaran. Akses terhadap sumberdaya usaha seperti permodalan dan sarana prasarana. Akses terhadap teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan dalam peningkatan produktifitas. Transfer teknologi baru dalam mengembangkan usahanya. Memberdayakan kelembagaan masyarakat (tani, nelayan) sebagai sarana kagiatan sosial dan ekonomi, serta hubungan pemerintah dan masyarakat.

Pembentukan dan penguatan koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan simpan pinjam. Masyarakat juga perlu dibantu dalam mempermudah akses perbankan. Meningkatkan apresiasi pemerintah terhadap kelompok yang berprestasi. Pemerintah memfasilitasi prasarana yang dibutuhkan pelaku kegiatan usaha (misalnya di tambak; prasarana jalan, jembatan penghubung).

Sangat dibutuhkan upaya pencerahan atau internalisasi nilai pembaharuan yang berkelanjutan. Kepada masyarakat pesisir harus dilakukan upaya pendidikan, pemahaman, penyadaran secara berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya sehingga mereka benar-benar memahami dan mendukung perubahan. Sebuah program harus mengandung nilai pembaharuan yang harus diinternalisasi melalui proses tersebut. Masyarakat akan sukarela mendukung keberhasilan program jika mereka meyakini nilai-nilainya. Masyarakat harus tahu manfaat dan kegunaan suatu perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kebutuhan penanggulangan kemiskinan di kawasan pesisir utara Jawa Tengah melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi karakter dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan prinsip komitmen pada keyakinan, nilai, adat kebiasaan, kepentingan bersama serta menciptakan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat.

Komitmen pada keyakinan, nilai, adat kebiasaan, kepentingan bersama bersandar pada kuatnya adat di masyarakat pesisir. Sesuatu yang dianggap baik dan menjadi adat akan dibela dan dipertahankan. Maka perlu dibangun *mindset* cara mendapatkan nafkah yang selaras dan berkelanjutan sebagai suatu kebenaran. Dilakukan penguatan pemahaman dan keterampilan manajemen wirausaha, mengubah *mindset* eksploitasi sumberdaya alam menjadi pelestarian, memberikan wacana diversifikasi nafkah dan usaha baru yang berkelanjutan, pembinaan dan peningkatan keterampilan dalam bidang-bidang usaha alternatif.

Menciptakan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat sesuai dengan karakter masyarakat pesisir dalam menanggapi semua hal. Program penanggulangan kemiskinan di pesisir harus memiliki karakter tersebut. Perlu keterbukaan akses terhadap jaminan sosial dan pelayanan dasar, akses terhadap sumberdaya usaha seperti permodalan dan sarana prasarana, akses terhadap teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan.

2. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting terkait pelaksanaan program-program pemerintah di wilayah pesisir, baik di Kabupaen Pati maupun di Kabupaten Pemalang sebagai berikut. Dilakukan kampanye atau penyuluhan berkelanjutan untuk mengubah *mindset* masyarakat pesisir dalam mencari nafkah, mengelola sumberdaya dan sumber nafkah alternatif. Memanfaatkan kelembagaan masyarakat (tani, nelayan) sebagai sarana kagiatan sosial dan ekonomi, serta hubungan pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan apresiasi terhadap kelompok yang berprestasi. Peningkatan akses terhadap layanan, prasarana dan sumberdaya yang dibutuhkan pelaku kegiatan usaha (misalnya di tambak; prasarana jalan, jembatan penghubung).

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Balitbang Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Pemalang serta tokoh masyarakat di Kecamatan Juwana, Pati dan Kecamatan Ulujami, Pemalang yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya penelitian dan penyusunan naskah laporan ini.

Pustaka Acuan

- Arviyanthi, Eka Putri Margaretha Suryaningsih & Tri Yuningsih (2014). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Mangunharjo)*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Auliyani, Diah, Boedi Hendarto dan Kismartini (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove di Beberapa Desa Pesisir Kabupaten Rembang: Tinjauan Berdasarkan Tahap Perencanaan*. Maspari Journal. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2014.
- Fitriansah, Herry (2012). *Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Pembangunan Wilaah dan Kota. Volume 8 Nomor 4. Desember 2012. Hal. 360-370
- Hiariey, Lilian Sarah (2013). *Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam*. Jurnal Matematika. Sains. dan Teknologi. Volume 14 Nomor 1. Maret 2013. Hal. 48-61
- Indarti, Iin. Dwiyadi Surya Wardana (2013). *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir Kota Semarang*. Benefit; Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 17. Nomor 1. Juni 2013. Hal. 75-88
- Itha (2013). *Budaya Masyarakat Pesisir*. <http://ithakelautan.blogspot.co.id>. Rabu. 22 Mei 2013
- Kusnadi (2010). *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Makalah disampaikan dalam kegiatan *jelajah budaya tahun 2010*. dengan tema “Ekspresi Budaya Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Jawa”. yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. di Yogyakarta. Tanggal 12-15 Juli 2010
- Kusumaningrum, Arta (2013). *Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Agriekonomika. Volume 2. Nomor 1. April.2013.
- Manumono, Danang. 2008. *Perubahan Perilaku Masyarakat Kawasan Pesisir Akibat Penurunan Pendapatan Sebagai Dampak Abrasi dan Rob di Kabupaten Demak*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani”. diselenggarakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 19 Nopember 2008
- Mardjoeki, H. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon*. Jurnal Ekonomi Issn: 2302-7169 Vol. 1 No. 1 September-Desember 2012. Hal. 52-57
- Pieter, Titayanto (2001). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Praktek Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. 29 Oktober - 3 November 2001
- Primyastanto, Mimit, Ratih Prita Dewi. Edi Susilo (2010). *Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Nelayan dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak. Desa Tambakrejo. Kecamatan Wonotirto. Kabupaten Blitar Jawa Timur)*. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Vol. 1 No.1 Tahun 2010
- Sipahelut, Michel (2010). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Syarief, Efrizal (2001). *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Majalah PP\Th 2001\Edisi-25
- Ticoalu, David E.B.S., Emil Reppie dan Aglius T.R. Telleng (2013). *Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap di Kota Manado*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap Volume 1 Nomor 3. Juni 2013. 76-80
- Tulungen, J. Johnnes (2001). *Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa. Sulawesi Utara*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. 29 Oktober - 3 November 2001
- Wahyudin, Yudi (2003). *Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal 5 Desember 2003 di Kampus Pusdiklat Kehutanan.
- Widodo, Slamet (2011). *Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir*. Makara. Sosial Humaniora. Vol. 15. No. 1. Juli 2011.